

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kebijakan sosial sebagai bagian dari kebijakan publik pada hakikatnya merupakan sebuah instrumen yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan. Dalam konteks demokrasi, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai bentuk administratif semata, tetapi juga sebagai wujud relasi politik antara pemerintah dengan masyarakat. Terkait hal tersebut, adanya suatu bentuk kebijakan yang bersifat partisipatif dan responsif, yaitu kebijakan aspirasi. Kebijakan aspirasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU MD3 (Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang mengatur fungsi, tugas, dan wewenang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, termasuk mekanisme penyaluran aspirasi. Kebijakan aspirasi lahir dari adanya kebutuhan masyarakat yang kemudian disuarakan melalui saluran politik, khususnya kepada wakil rakyat, untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program konkret. Oleh karena itu, kebijakan aspirasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan publik, tetapi juga memiliki dimensi politik yang erat kaitannya dengan upaya menjaga kedekatan dan loyalitas konstituen

terhadap wakil rakyat (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2019).

Dalam perkembangan demokrasi Indonesia, isu pendidikan menjadi salah satu sektor strategis yang sering menjadi perhatian dalam kebijakan aspirasi. Pendidikan dipandang sebagai hak fundamental warga negara sekaligus kunci pembangunan sumber daya manusia. Sesuai amanat Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan akses pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi.

Kelompok Umur APS	Angka Partisipasi Sekolah (APS)		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
	2023	2023	2023
5-6	-	-	-
7-12	98,73	99,95	99,31
13-15	97,67	100,00	98,76
16-18	79,41	89,01	84,41
19-24	49,61	54,67	52,12

Gambar 1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2023

Berdasarkan tabel pada gambar diatas yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik Kota Samarinda Tahun 2023 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok usia 19–24 tahun berada pada angka 52,12% (laki-laki 49,61% dan perempuan 54,67%), yang menunjukkan bahwa partisipasi pada jenjang pendidikan tinggi masih belum optimal (Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan dasar hingga menengah relatif merata, tantangan dalam pemerataan pendidikan tinggi masih cukup signifikan. Faktor ekonomi, geografis, serta keterbatasan dukungan kebijakan menjadi penyebab utama terjadinya kesenjangan tersebut (Anton et al., 2025). Selain itu, kemiskinan juga menjadi faktor yang berkaitan erat dengan rendahnya akses pendidikan, di mana keterbatasan ekonomi memengaruhi kemampuan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, program beasiswa menjadi salah satu instrumen kebijakan yang digunakan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi hambatan ekonomi yang dihadapi masyarakat (Rohaeni & Saryono, 2018).

Upaya peningkatan akses pendidikan tersebut diwujudkan melalui berbagai program beasiswa oleh pemerintah. Beasiswa aspirasi merupakan salah satu bentuk dari kebijakan aspirasi anggota legislatif untuk menyerap dan memperjuangkan kepentingan serta keinginan masyarakat yang diwakilinya. Beasiswa Aspirasi sendiri adalah pemberian beasiswa melalui aspirasi anggota DPR RI yang memberikan keleluasaan kepada anggota legislatif untuk mengumpulkan data calon penerima dan kemudian menyerahkan data tersebut ke sekolah atau perguruan

tinggi (Putri, Diva Lutfiana., 2024). Pada dasarnya tidak ada perbedaan mencolok antara Beasiswa jalur Reguler dan Aspirasi, yang membedakan hanya usulan penerima Beasiswa Aspirasi terutama KIP Kuliah Aspirasi yang diusulkan melalui pemangku kepentingan seperti legislatif yang diusulkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Indonesia Pintar (Putri & Dzulfaroh, 2024).

Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi. Dalam implementasinya, terdapat skema penyaluran melalui jalur aspirasi anggota legislatif, salah satunya Beasiswa Aspirasi yang diinisiasi oleh Hetifah Sjaifudian sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Timur yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, ristek, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan. Beasiswa aspirasi Hetifah telah dilaksanakan sejak tahun 2017 (Pratama, 2025). Melalui program beasiswa aspirasi, Hetifah berupaya memperluas pemerataan akses pendidikan di Kalimantan Timur, serta akan terus berkomitmen dan bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk merealisasikan wajib belajar 12 tahun kepada pelajar (Kaltim Today, 2021).

Secara skema, terdapat dua jenis bentuk Beasiswa Aspirasi Hetifah yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang merupakan bagian atau skema dari Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi yang diberikan kepada Mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan memiliki KIP Kuliah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi, 2022). Perbedaan signifikan antara keduanya ialah PIP lebih terfokus dan diperuntukkan pada siswa SD, SMP, dan SMA/ sederajat berusia 7-20 tahun, sedangkan KIP ditujukan kepada mahasiswa lulusan tiga tahun terakhir yang diterima di perguruan tinggi yang terakreditasi resmi dan dibawah naungan Kemendikbudristek (@*hetifahscholarship*, 2023). Selain itu, KIP menyediakan komponen pembiayaan termasuk biaya kuliah dan biaya hidup, sementara PIP memberikan dana tunai langsung kepada siswa untuk keperluan sekolah seperti pembelian buku atau seragam (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025).

Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki karakteristik sebagai pusat pendidikan tinggi yang menampung mahasiswa dari berbagai daerah di Kalimantan Timur, seperti Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, hingga Mahakam Ulu. Berdasarkan data, terdapat sekitar 50 perguruan tinggi di Kota Samarinda yang terdiri dari 7 perguruan tinggi negeri dan 43 perguruan tinggi swasta (DataPendidikan.com, 2025). Konsentrasi institusi pendidikan tersebut menjadikan Samarinda sebagai pusat aktivitas pendidikan tinggi sekaligus ruang berkumpulnya mahasiswa lintas daerah. Kondisi ini membentuk komposisi sosial yang didominasi oleh kelompok usia muda terdidik, khususnya mahasiswa pada rentang usia 18–24 tahun. Kelompok usia ini juga termasuk dalam kategori pemilih dalam pemilu. Data Komisi Pemilihan Umum menunjukkan bahwa pemilih muda usia 17–40 tahun mencapai sekitar 53-55% dari total pemilih nasional pada Pemilu 2024 (Komisi Pemilihan Umum, 2023). Data tersebut menunjukkan keterkaitan antara kelompok penerima program KIP Kuliah dengan struktur pemilih dalam konteks politik elektoral.

Posisi Kota Samarinda sebagai wilayah penyangga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) turut memperkuat dinamika sosial dan politik di wilayah tersebut. Peningkatan mobilitas penduduk, pembangunan infrastruktur, serta intensitas aktivitas ekonomi menjadikan Samarinda sebagai wilayah dengan dinamika yang berkembang, termasuk dalam distribusi kebijakan publik (Arumanto, 2023). Maka dari itu, penyaluran program pendidikan melalui jalur aspirasi berlangsung dalam ruang sosial yang memiliki konsentrasi pemilih muda dan aktivitas politik yang dinamis.

Istilah *pork barrel* atau “gentong babi” merujuk pada praktik pengalokasian anggaran publik yang diupayakan oleh politisi atau anggota parlemen untuk disalurkan kepada konstituennya sebagai bentuk imbalan atas dukungan politik, baik dalam konteks kampanye maupun perolehan suara dalam pemilihan umum. Praktik ini dilakukan dengan tujuan mempertahankan atau meningkatkan peluang keterpilihan kembali pada pemilu berikutnya. Dalam perkembangannya, praktik *pork barrel* kerap menjadi sorotan karena dinilai lebih mengedepankan kepentingan politik individu dibandingkan kepentingan publik secara luas, serta memiliki potensi terjadinya penyimpangan dalam distribusi anggaran yang tidak tepat sasaran (Isnaeni, 2010).

Dalam kerangka politik, fenomena tersebut dapat dipahami melalui perspektif *pork barrel politics*. *Pork barrel politics* merupakan praktik distribusi sumber daya publik dalam bentuk program pemerintah yang diarahkan kepada kelompok atau wilayah tertentu melalui perantara aktor politik, dengan implikasi terhadap

perolehan dukungan politik. Program yang secara formal dikategorikan sebagai kebijakan publik dapat mengandung dimensi politik dalam implementasinya, terutama ketika proses distribusinya melibatkan aktor legislatif dan menysasar kelompok masyarakat tertentu. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa praktik *pork barrel* tidak hanya terbatas pada alokasi anggaran, tetapi juga mencerminkan hubungan antara distribusi kebijakan publik dan strategi politik dalam konteks elektoral (Aspinall dan Sukmajati, 2014).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa Program Beasiswa KIP Kuliah Aspirasi Hetifah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kebijakan pendidikan dalam memperluas akses dan pemerataan pendidikan tinggi, tetapi juga berada dalam konteks relasi antara distribusi kebijakan publik dan dinamika politik representatif melalui mekanisme aspirasi. Keterlibatan aktor legislatif dalam proses penyaluran program, sasaran penerima yang berada pada kelompok usia pemilih, serta karakteristik Kota Samarinda sebagai pusat konsentrasi mahasiswa dan wilayah dengan dinamika politik yang berkembang menunjukkan adanya keterkaitan antara kebijakan pendidikan dan praktik politik elektoral. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai kebijakan aspirasi di bidang pendidikan, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana program Beasiswa KIP Kuliah Aspirasi dapat dianalisis dalam perspektif *pork barrel politics* sebagai bagian dari distribusi sumber daya publik yang memiliki implikasi politik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah “Bagaimana kebijakan aspirasi pada Program Beasiswa KIP Kuliah Aspirasi Hetifah dijalankan sebagai praktik *Pork Barrel Politics* di Kota Samarinda?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan aspirasi pada Program Beasiswa KIP Kuliah Aspirasi Hetifah dijalankan sebagai praktik *Pork Barrel Politics* di Kota Samarinda.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penilaian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi setiap orang yang membacanya.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan kajian bagi para pembaca maupun akademisi di bidang ilmu sosial dan ilmu politik, khususnya terkait kebijakan aspirasi dalam bentuk program beasiswa. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai konsep *pork barrel politics*, sehingga dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana kebijakan sosial, seperti beasiswa, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia, tetapi juga sebagai dinamika hubungan wakil rakyat dengan masyarakat.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya yang mengkaji kebijakan aspirasi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan untuk menilai sejauh mana program beasiswa aspirasi benar-benar berfungsi tidak hanya sebagai sarana distribusi pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen politik representasi yang berkelanjutan.

### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan suatu kegiatan peneliti untuk mencari perbandingan dan kemudian membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Pada penelitian terdahulu akan dipaparkan hasil penelitian yang dapat dijadikan referensi atau menambah informasi sekaligus dapat digunakan untuk membandingkan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yang ada keterkaitannya dengan permasalahan yang akan menjadi objek penelitian untuk menghindari terjadinya kesamaan pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya. Sehingga, hasilnya akan dapat diketahui bahwa penulisan yang dilakukan memiliki perbedaan lokasi, konsep, indikasi, dan indikator yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa pustaka sebelumnya sebagai acuan pembanding. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan bahwa ditemukan beberapa

penelitian yang membahas terkait dengan strategi menjaga hubungan dengan konstituen diantaranya sebagai berikut :

Pustaka pertama berjudul “Strategi Menjaga Konstituen: Studi Kasus Anggota DPR RI 2014-2019 Daerah Pemilihan Jawa Tengah I” oleh Angga Arrasyid Dian Purnama. Penelitian ini membahas strategi yang digunakan oleh anggota badan legislatif periode 2014-2019 untuk menjaga suara konstituen di daerah pemilihan mereka setelah terpilih sebagai anggota legislatif dengan mengambil sampel utama seorang anggota DPR RI dan dua anggota DPR RI sebagai sampel perbandingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cara anggota DPR RI dalam menciptakan loyalitas konstituen pasca terpilih. Penelitian ini menggunakan konsep jaringan (*network*) dan teori konsep strategi politik oleh Schroder (2009). Hasil penelitian ini bahwa terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan seperti dialog interaktif, pemberian bantuan, pemasangan atribut kampanye (spanduk/billboard/dll), pemanfaatan struktur partai dan massa basis partai, dorongan dari kader lain dari partai, pendekatan komunitas, media sosial, dan pembentukan relawan. Seluruh strategi tersebut memiliki tujuan untuk menjaga suara konstituen di suatu daerah pemilihan. Namun, strategi yang dianggap sebagai strategi paling efektif dalam menjaga konstituen ialah dengan melalui dialog tatap muka berdasarkan hasil penelitian dari ketiga pihak anggota DPR RI yang dijadikan sampel penelitian, mulai dari Juliari P Batubara, Agus Hermanto, dan Yayuk Basuki (Purnama, 2019).

Pustaka kedua, penelitian yang dilakukan oleh Erawati pada tahun 2020, yang berjudul “Polemik Dana Aspirasi Dalam Perspektif Politik Hukum Penganggaran Indonesia”. Latar belakang penelitian ini dianggap rentan praktik korupsi dan keberadaan dana aspirasi dinilai telah menyimpang dari koridor hukum ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi dana aspirasi dalam perspektif politik hukum penganggaran Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara memperoleh informasi dari berbagai sumber literasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, eksistensi dana aspirasi membuat mekanisme *check and balances* menjadi ambigu, menciptakan ketidakmerataan pembangunan dan ketidakadilan baru, dan dalam menyikapi isu dana aspirasi, dibutuhkan solidaritas dan sikap tegas dari pemerintah dengan tetap mengacu pada perencanaan pembangunan yang telah ada (Erawati, 2020).

Ketiga, penelitian yang berjudul “POLITIK PORK BARREL: BANTUAN SOSIAL (BANSOS) JOKOWI MENJELANG PEMILIHAN PRESIDEN 2024” oleh Muhammad Ishak Syahadat, Iriyani Astuti Arief, dan La Ode Efrianto pada tahun 2024. Fokus utama pada penelitian adalah bagaimana Presiden Joko Widodo memanfaatkan bansos sebagai instrumen politik untuk meningkatkan elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukungnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan politik distributif dan teori pork barrel, penelitian ini menganalisis pola distribusi bansos di daerah-daerah dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tinggi,

seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya strategi yang diskriminatif dalam distribusi bansos untuk mendukung kandidat tertentu, yang dilakukan melalui pengalokasian dana pemerintah secara strategis. Studi ini berkontribusi pada pemahaman praktik politik distributif dalam konteks politik elektoral Indonesia, dengan implikasi yang relevan bagi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara (Muhammad Ishak Syahadat et al., 2024).

Keempat, penelitian dengan judul “Kedudukan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Ketatanegaraan Indonesia” oleh Mei Susanto. Penelitian ini berangkat bahwa dana aspirasi DPR menjadi isu publik terutama berkaitan dengan fungsi dan hak budget DPR. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dana aspirasi DPR dikaitkan dengan fungsi anggaran DPR, dan untuk mengetahui apakah dana aspirasi DPR menjadi kebutuhan sebagai respon kewajiban DPR dalam memenuhi aspirasi rakyat. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan literatur hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur serta hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian ini yaitu, pertama dana aspirasi DPR tidak sesuai dengan fungsi anggaran DPR RI, karena DPR seharusnya berfungsi memberikan persetujuan, bukan memperoleh jatah anggaran tertentu sebagaimana eksekutif. Kedua, dana aspirasi DPR bukanlah sebuah jawaban atas kebutuhan dalam memenuhi aspirasi rakyat, bahkan dapat menimbulkan budaya negatif yaitu *pork barrel politics* (Susanto, 2017).

Pustaka kelima, penelitian berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Konstituen Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo” oleh Eman Mangopa, Moh. Rolli Paramata, dan Mohamad Afan Suyanto. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, citra dan kepuasan terhadap loyalitas Konstituen Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan teori kualitas layanan oleh Lewis dan Booms (1983), Kepuasan (*satisfaction*), Citra merek menurut Kotler dan Keller (2016), dan loyalitas (Kotler, 2004:111). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “secara langsung Kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konstituen, Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konstituen, Kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konstituen, Citra merek berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap loyalitas konstituen serta Kepuasan konstituen berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konstituen anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo. sementara Secara tidak langsung kualitas layanan melalui kepuasan konstituen tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konstituen, serta citra merek melalui kepuasan konstituen berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas konstituen anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo” (Mangopa et al., 2022).

Dari kelima penelitian terdahulu yang digunakan, penulis dapat mengetahui persamaan dan perbedaan pada penelitian yang telah berhasil dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Persamaannya berkaitan dengan topik penelitian, yaitu

strategi DPR dalam merawat konstituen, kebijakan aspirasi DPR, dan praktik politik *pork barrel*. Kesamaan lainnya terletak pada figur yang diteliti yaitu legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat dan dengan menggunakan teori politik gentong babi atau *pork barrel politics*.

Sedangkan hal yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada lokasi penelitian dan objek kajian yang lebih spesifik, yaitu kebijakan aspirasi dalam bentuk program beasiswa oleh aktor legislatif tertentu dalam upaya merawat konstituen di wilayah daerah pemilihan tertentu, sedangkan objek kajian pada penelitian sebelumnya lebih luas dan beragam. Dengan demikian, tiap penelitian memberi sudut pandang berbeda. Hal ini penting dianalisis lebih lanjut karena penelitian ini tidak hanya melihat strategi aktor legislatif dan loyalitas konstituen menjelang pemilu atau dana aspirasi DPR, melainkan menekankan pada kebijakan aspirasi dalam suatu bentuk program beasiswa yang sudah ada yang dijalankan oleh aktor legislatif sebagai instrumen representasi politik dalam menunjang legitimasi politik. Penelitian ini menempatkan kebijakan aspirasi bukan sekadar sebagai mekanisme teknis penyaluran program, tetapi juga sebagai medium yang sarat muatan politik.

Selain itu, perbedaan penting lainnya adalah lokasi penelitian yang berfokus pada Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik khusus sebagai ibu kota provinsi sekaligus daerah strategis yang sedang dipersiapkan sebagai bagian dari kawasan Ibu Kota Negara (IKN). Hal ini membuat dinamika politik dan kebijakan aspirasi di Kota Samarinda memiliki konteks berbeda dibandingkan lokus penelitian sebelumnya. Kondisi ini menjadikan

penelitian relevan untuk menggali bagaimana kebijakan aspirasi dijalankan dalam konteks daerah yang tengah mengalami pertumbuhan pesat, dimana kebutuhan akan representasi politik yang responsif dan kebijakan berbasis aspirasi semakin krusial bagi pembangunan sumber daya manusia.

## **1.6 Landasan Teori**

### **1.6.1 *Pork Barrel Politics***

Dalam kajian politik elektoral, *pork barrel politics* juga dipahami sebagai salah satu bentuk konkret dari patronase. Menurut Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (2014), *pork barrel* merupakan distribusi proyek-proyek pemerintah yang didanai oleh anggaran publik dan ditujukan kepada wilayah geografis tertentu dengan tujuan implisit memperoleh dukungan politik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal program tersebut dikemas sebagai kebijakan publik, dalam praktiknya terdapat kepentingan elektoral yang kuat. Karakter utama *pork barrel* terletak pada penggunaan dana publik untuk membiayai program yang secara administratif bersifat programatik, tetapi implementasinya sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Program-program tersebut umumnya berupa proyek infrastruktur skala kecil atau bantuan ekonomi bagi kelompok masyarakat tertentu yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat loyalitas politik penerimanya (Aspinall & Sukmajati, 2014).

Konsep *pork barrel politics* merujuk pada praktik pengalokasian anggaran publik kepada wilayah tertentu melalui perantara aktor politik, terutama legislator, dengan tujuan yang tidak hanya bersifat pembangunan, tetapi juga memiliki muatan

kepentingan elektoral. *Pork barrel* merupakan bentuk pengistimewaan pengeluaran pemerintah pusat yang diarahkan ke daerah tertentu melalui perwakilan politik. Alokasi ini memberikan keuntungan bagi legislator karena dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan elektabilitas mereka dalam pemilihan berikutnya. Dengan demikian, *pork barrel* tidak sekadar mencerminkan distribusi sumber daya negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam kompetisi politik (Smith, 2011).

Dalam perkembangannya, makna *pork barrel* mengalami perluasan. Jika pada awalnya praktik ini lebih identik dengan pemberian manfaat kepada individu, maka dalam konteks kontemporer ia lebih sering diwujudkan dalam bentuk program atau proyek yang menysasar kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Artinya, distribusi sumber daya tidak lagi bersifat individual, melainkan kolektif, seperti pembangunan infrastruktur atau penyediaan fasilitas publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Secara konseptual, *pork barrel politics* memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, praktik ini tidak hanya dilakukan oleh anggota legislatif, tetapi juga oleh aktor eksekutif yang memiliki kepentingan elektoral. Kedua, sumber pembiayaannya berasal dari anggaran negara, umumnya dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Ketiga, distribusi sumber daya bersifat teritorial, yakni diarahkan pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki nilai strategis secara politik, baik sebagai basis dukungan maupun sebagai target perluasan suara (Aspinall & Sukmajati, 2014).

Motif di balik praktik ini mengemukakan bahwa petahana memiliki beberapa alasan untuk menjalankan *pork barrel politics*. Pertama, pelaksanaan program pemerintah di daerah dapat membangun citra positif dan rekam jejak yang

menguntungkan di mata pemilih. Kedua, praktik ini berfungsi sebagai strategi mitigasi terhadap munculnya penantang politik, termasuk yang memiliki kualitas tinggi, dengan menunjukkan superioritas kinerja. Ketiga, *pork barrel* memungkinkan petahana menarik dukungan pemilih melalui janji maupun realisasi program, legislasi, dan proyek pembangunan yang konkret (John Ferejohn, 1974). Dari sisi dampak politik, *pork barrel* memiliki kemiripan dengan praktik klientelisme karena sama-sama menciptakan hubungan transaksional antara aktor politik dan pemilih. Namun, adanya perbedaan mendasar di antara keduanya. Dalam *pork barrel politics*, distribusi sumber daya dilakukan sebelum pemilu sebagai upaya memengaruhi pilihan pemilih. Sementara itu, dalam klientelisme, distribusi manfaat cenderung diberikan setelah pemilu kepada kelompok pendukung sebagai bentuk balas jasa politik (Susan C. Stokes, 2013).

Dalam praktik politik, terutama di tingkat lokal, kandidat petahana sering menjadikan keberhasilan dalam menghadirkan proyek-proyek tersebut sebagai bagian dari strategi kampanye. Rekam jejak (*track record*) dalam mendistribusikan program pemerintah ditampilkan sebagai bukti kapasitas dan komitmen kepada konstituen. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi sumber daya publik tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan pembangunan, tetapi juga sebagai alat legitimasi politik. Di Indonesia, praktik *pork barrel politics* kerap dikaitkan dengan keberadaan dana aspirasi yang dialokasikan kepada anggota legislatif di berbagai tingkatan. Secara normatif, dana ini bertujuan untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui program pembangunan. Namun, fenomena serupa juga ditemukan di berbagai negara lain dengan istilah *constituency development funds*

(van Zyl, 2010), yang menegaskan bahwa praktik ini merupakan fenomena global dalam sistem politik demokratis.

Meskipun secara formal termasuk dalam kategori kebijakan publik yang bersifat programatik, dalam implementasinya distribusi *pork barrel* sering kali tidak didasarkan pada kriteria objektif, melainkan pada pertimbangan politik. Oleh karena itu, *pork barrel politics* dikategorikan sebagai bagian dari patronase karena mengandung unsur kontingensi, yaitu adanya harapan timbal balik berupa dukungan politik dari masyarakat penerima manfaat (Aspinall & Sukmajati, 2014). Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi sumber daya, tetapi juga sebagai sarana pembentukan jaringan klientelistik (*clientelistic networks*). Penerima manfaat dapat berkembang menjadi basis dukungan politik yang loyal, bahkan direkrut sebagai bagian dari tim kampanye. Dengan demikian, hubungan antara politisi dan masyarakat cenderung bersifat personal dan transaksional, bukan semata-mata berbasis program kebijakan.

Konsep *pork barrel politics* yang dikemukakan oleh Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (2014) dalam buku *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014* merupakan bagian dari praktik patronase politik yang menekankan pada distribusi sumber daya oleh politisi kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh dan mempertahankan dukungan politik. *Pork barrel politics* merujuk pada penggunaan program atau kebijakan yang bersumber dari dana publik dan dialokasikan kepada kelompok atau wilayah tertentu, yang secara implisit maupun eksplisit memiliki dimensi elektoral.

Dalam memahami praktik *pork barrel politics*, terdapat lima definisi konsep utama yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem distribusi politik yang terstruktur lalu digunakan sebagai alat analisis, konsep tersebut mencakup 5 indikator, yaitu:

#### 1. Sumber dan Bentuk Bantuan

Indikator pertama adalah sumber dan bentuk bantuan, yang menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat pada dasarnya berasal dari sumber daya publik, seperti anggaran negara, namun disalurkan melalui mekanisme yang melibatkan aktor politik. Bantuan tersebut dapat berbentuk berbagai macam program, baik berupa uang, barang, proyek pembangunan, maupun layanan sosial seperti pendidikan. Dalam konteks ini, bantuan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik, tetapi juga sebagai alat politik yang memungkinkan aktor politik memperoleh pengakuan dan legitimasi dari masyarakat penerima.

#### 2. Aktor Politik dan Jaringan

Indikator ketiga adalah aktor politik dan jaringan, yang menekankan bahwa distribusi bantuan tidak dilakukan secara langsung oleh negara kepada masyarakat, melainkan melalui keterlibatan berbagai aktor dan jaringan. Politisi, khususnya anggota legislatif, berperan sebagai penginisiasi sekaligus penghubung antara sumber daya negara dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, distribusi tersebut juga melibatkan perantara atau *broker*, seperti tim sukses, relawan, atau tokoh masyarakat yang memiliki kedekatan dengan konstituen. Jaringan ini berfungsi untuk menjangkau penerima manfaat, menyaring informasi, serta memastikan

bahwa bantuan sampai kepada kelompok sasaran. Dengan demikian, distribusi bantuan dalam *pork barrel politics* bersifat berbasis jaringan (*network-based distribution*) yang menggabungkan struktur formal dan informal.

### 3. Pola Distribusi (Targeting)

Indikator kedua adalah pola distribusi atau *targeting*, yang menunjukkan bahwa bantuan tidak diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat, melainkan diarahkan kepada kelompok atau wilayah tertentu yang dianggap strategis. Pola ini dapat berbasis kelompok sosial tertentu maupun berbasis wilayah geografis, seperti daerah pemilihan (dapil). Dalam praktiknya, distribusi ini seringkali tidak sepenuhnya didasarkan pada kriteria objektif, melainkan mempertimbangkan kedekatan sosial, jaringan politik, serta potensi dukungan elektoral. Dengan demikian, *targeting* dalam *pork barrel politics* mencerminkan adanya alokasi selektif yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan politik bagi aktor yang mendistribusikan bantuan.

### 4. Waktu Distribusi

Indikator keempat adalah waktu distribusi, yang berkaitan dengan kapan bantuan tersebut disalurkan dalam konteks dinamika politik. Distribusi sumber daya dalam praktik *pork barrel* tidak terjadi secara acak, melainkan seringkali mengikuti siklus politik, terutama menjelang pemilu atau dalam periode tertentu yang memiliki signifikansi elektoral. Penyaluran bantuan pada waktu-waktu strategis ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas politisi serta memperkuat ingatan dan preferensi pemilih terhadap aktor yang memberikan bantuan. Oleh

karena itu, waktu distribusi menjadi elemen penting yang menunjukkan bahwa kebijakan publik dapat dimanfaatkan sebagai instrumen dalam strategi politik jangka pendek maupun jangka panjang.

#### 5. Tujuan Distribusi

Indikator kelima adalah tujuan distribusi, yang menegaskan bahwa pemberian bantuan dalam kerangka *pork barrel politics* tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memiliki tujuan politik yang jelas. Bantuan digunakan sebagai sarana untuk membangun citra positif, meningkatkan kedekatan antara politisi dan masyarakat, serta menciptakan hubungan yang bersifat klientelistik. Dalam hubungan ini, terdapat ekspektasi timbal balik, di mana masyarakat sebagai penerima manfaat cenderung memberikan dukungan politik kepada aktor yang dianggap telah membantu mereka. Dengan demikian, distribusi bantuan berfungsi sebagai strategi untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperluas basis dukungan politik.

Kelima indikator tersebut menunjukkan bahwa *pork barrel politics* merupakan praktik yang menggabungkan dimensi kebijakan publik dan kepentingan politik dalam satu kerangka yang saling terkait. Distribusi sumber daya publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan, tetapi juga sebagai alat strategis dalam membangun relasi politik antara wakil rakyat dan konstituennya dalam sistem demokrasi representatif. Sejalan dengan kerangka konseptual tersebut, praktik *pork barrel politics* kerap dimanfaatkan oleh anggota legislatif sebagai strategi untuk memperoleh alokasi anggaran negara yang kemudian

didistribusikan kepada konstituen di daerah pemilihannya. Distribusi ini tidak berlangsung secara netral, melainkan diarahkan untuk menciptakan insentif politik bagi masyarakat agar tetap memberikan dukungan pada pemilu berikutnya. Dalam konteks ini, sumber daya publik yang pada dasarnya bersifat universal diolah menjadi instrumen politik yang memiliki nilai elektoral, di mana pemberian manfaat kepada masyarakat diharapkan berbanding lurus dengan loyalitas politik yang diberikan kepada aktor yang menyalurkannya.

*Pork barrel* dapat dipahami sebagai upaya sistematis, khususnya oleh petahana, dalam mengonversi sumber daya negara menjadi dukungan elektoral (Saragintan, 2011). Argumentasi ini memperkuat penjelasan sebelumnya bahwa kelima indikator dalam *pork barrel politics* yang meliputi sumber dan bentuk bantuan, pola distribusi, aktor dan jaringan, waktu distribusi, serta tujuan distribusi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam membentuk strategi politik berbasis distribusi sumber daya. Oleh karena itu, *pork barrel politics* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan, melainkan sebagai strategi politik yang melekat dalam praktik patronase. Melalui distribusi sumber daya negara yang bersifat selektif, terarah, dan mempertimbangkan momentum politik, praktik ini menjadi instrumen penting bagi aktor politik dalam membangun legitimasi, mempertahankan kekuasaan, sekaligus memperluas basis dukungan dalam sistem demokrasi representatif.

### **1.7 Operasionalisasi Konsep**

Operasionalisasi konsep adalah tahapan yang dilakukan dengan mengembangkan suatu konsep abstrak untuk menghasilkan pengamatan empiris

dengan merincikan konsep tersebut menjadi beberapa variabel. Langkah awal pada bagian operasionalisasi konsep yaitu dengan mengumpulkan data atau teori yang digunakan dalam penelitian, kemudian mengidentifikasi konsep definisi operasional dan pengukuran variabel yang berfungsi untuk menyusun pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber, sehingga data yang dihasilkan akan relevan dengan pertanyaan dan tujuan penelitian (Dwiastuti, 2017). Selain itu, (Aminah, 2019). Mendefinisikan kegiatan operasionalisasi konsep di dalam penelitian merupakan pendefinisian yang dilakukan peneliti atas dasar konsep yang digunakan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Operasionalisasi konsep diartikan sebagai kegiatan untuk menciptakan beberapa indeks, skala, atau indikator pengukuran yang sama, bertujuan untuk menghitung berapa banyak atau sampai di tingkat mana konsep tersebut ada dan dapat diteliti.

Tabel 1.1 Operasional Konsep

<b>Konsep</b>	<b>Definisi</b>	<b>Indikator Konsep</b>
<b><i>Pork Barrel Politics</i></b>	Sumber dan Bentuk Bantuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program berasal dari kebijakan aspirasi/dana publik (KIP-K aspirasi)</li> <li>- Bentuk bantuan berupa beasiswa pendidikan</li> </ul>
	Aktor Politik dan Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran legislator sebagai penginisiasi program dan fungsi representasi</li> <li>- Peran tim (HSA &amp; tenaga ahli) sebagai perantara</li> <li>- Keterlibatan kampus dalam pelaksanaan</li> </ul>
	Pola Distribusi (Targeting)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya prioritas wilayah/kelompok tertentu</li> <li>- Penyaluran berbasis daerah pemilihan (dapil)</li> <li>- Tidak sepenuhnya berbasis kriteria objektif</li> </ul>
	Waktu Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program berjalan dalam konteks siklus politik</li> <li>- Keterkaitan dengan momentum elektoral</li> </ul>

	Tujuan Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Sebagai Sarana Membangun Engagement Konstituen</li> <li>- Implikasi Engagement sebagai Strategi Merawat Konstituen</li> </ul>
--	-------------------	--

Sumber: Diolah Peneliti

## 1.8 Argumen Penelitian

Kebijakan aspiratif dalam bentuk program Beasiswa KIP Kuliah (KIP-K) Aspirasi merepresentasikan adanya hubungan yang erat antara praktik politik dan kebijakan publik dalam merespons kebutuhan sosial masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi. Skema bantuan pendidikan yang disalurkan melalui jalur aspirasi anggota legislatif ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemerataan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu, tetapi juga mengandung dimensi politik yang kuat dalam membangun dan memperkuat relasi antara wakil rakyat dan konstituennya. Dalam konteks ini, distribusi bantuan pendidikan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses administratif, melainkan sebagai bagian dari praktik politik yang melekat dalam sistem demokrasi representatif.

Dengan menggunakan perspektif *pork barrel politics* sebagaimana dikemukakan oleh Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (2014), kebijakan KIP-K aspirasi dapat dipahami sebagai bentuk distribusi sumber daya publik yang dilakukan secara selektif melalui mekanisme politik untuk memperoleh dan mempertahankan dukungan konstituen. Program ini menunjukkan bagaimana dana publik yang seharusnya bersifat universal dapat diarahkan kepada kelompok atau wilayah tertentu, khususnya dalam daerah pemilihan legislator, melalui jaringan

politik yang melibatkan berbagai aktor perantara. Dengan demikian, program beasiswa tersebut menjadi bentuk konkret dari praktik distribusi politik, di mana bantuan pendidikan berfungsi tidak hanya sebagai alat kesejahteraan, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kedekatan, meningkatkan visibilitas, serta memperkuat legitimasi politik aktor yang menyalurkannya.

Melalui perspektif *pork barrel politics*, program KIP-K aspirasi dapat dianalisis berdasarkan lima indikator utama, yaitu sumber dan bentuk bantuan, pola distribusi, aktor dan jaringan, waktu distribusi, serta tujuan distribusi. Dari sisi sumber dan bentuk bantuan, program ini berasal dari dana publik namun disalurkan melalui mekanisme aspiratif yang melibatkan peran aktif legislator. Dari sisi pola distribusi, bantuan tidak sepenuhnya bersifat universal, melainkan diarahkan secara selektif kepada kelompok masyarakat tertentu dan wilayah yang berada dalam jangkauan politik legislator. Sementara itu, dari sisi aktor dan jaringan, distribusi bantuan melibatkan tidak hanya legislator sebagai penginisiasi, tetapi juga jaringan perantara seperti tim aspirasi dan institusi pendidikan sebagai pelaksana teknis. Selain itu, dari sisi waktu distribusi, program aspirasi berpotensi mengikuti dinamika dan momentum politik tertentu, yang menunjukkan adanya pertimbangan strategis dalam penyalurannya. Adapun dari sisi tujuan distribusi, bantuan pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun citra, meningkatkan kedekatan, serta merawat hubungan politik dengan konstituen.

Kebijakan pendidikan berbasis aspirasi, khususnya program KIP-K aspirasi Hetifah, tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi bantuan sosial, tetapi

juga sebagai instrumen strategis dalam praktik *pork barrel politics*. Distribusi bantuan pendidikan dalam program ini mencerminkan adanya upaya sistematis dari aktor politik untuk mengonversi sumber daya negara menjadi dukungan politik melalui pendekatan yang bersifat selektif, terarah, dan berbasis jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa batas antara kebijakan publik dan strategi politik menjadi semakin kabur, di mana program pemerintah dapat berfungsi ganda sebagai alat kesejahteraan sekaligus sebagai sarana untuk membangun dan mempertahankan legitimasi politik.

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang berupaya memahami fenomena sosial secara mendalam melalui penciptaan gambaran yang kompleks dan atau menyeluruh terhadap permasalahan yang akan diteliti (Creswell & Creswell, 2018). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif menggambarkan keadaan sebenarnya yang diamati di lapangan secara transparan dan mendalam yang sebelumnya telah diperoleh dari berbagai sumber penelitian atau media informasi (P. Lamadang et al., 2022). Peneliti harus mampu mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi atau *setting* sosial yang akan dimuat dalam penelitian yang bersifat naratif berisi data dan fakta. Dalam hal ini, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan data aktual yang diungkap di lapangan untuk mendukung penelitian yang disajikan oleh peneliti dalam laporan penelitiannya

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan penelitian. Penentuan lokasi ini dapat diartikan bahwa tujuan dan objek yang akan diteliti sudah ditetapkan, sehingga akan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penulis melakukan dan menetapkan penelitian di Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, DKI Jakarta dan informan penerima Beasiswa KIP-K Aspirasi Hetifah di Kota Samarinda untuk memperoleh informasi mengenai data yang dibutuhkan. Lokasi tersebut akan digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan berfokus mengenai Kebijakan Aspirasi dalam Upaya Merawat Konstituen pada Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Aspirasi Hetifah di Kota Samarinda.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang atau sekelompok orang yang akan memberikan informasi dan keterangan mengenai apa yang sedang diteliti. Subjek penelitian memiliki kriteria tertentu yang mana seseorang tersebut memiliki informasi dan pemahaman sesuai dengan kebutuhan penulis dalam mendukung penelitian yang akan dilakukan. Subjek dalam penelitian atau informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Ibu Hetifah Sjaifudian selaku penyalur Beasiswa Aspirasi Hetifah sekaligus Ketua Komisi X DPR RI yang menaungi bidang pendidikan.
2. Tenaga ahli Ibu Hetifah Sjaifudian di Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar
3. Tim penyalur Beasiswa Aspirasi Hetifah

4. Akademisi atau pakar kebijakan publik di bidang sosial atau pendidikan
5. Mahasiswa penerima bantuan program Beasiswa KIP-K Aspirasi Hetifah di Kota Samarinda
6. Orang tua/wali mahasiswa penerima bantuan program Beasiswa KIP-K Aspirasi Hetifah di Kota Samarinda
7. Pihak kampus sebagai penyalur program beasiswa KIP-K Aspirasi Hetifah di Kota Samarinda

#### **1.9.4 Jenis data**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian *field research* (lapangan). Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian secara langsung atau di lapangan yang sebelumnya sudah dipilih sebagai lokasi untuk memahami fenomena yang ada, serta mengumpulkan data-data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, disertai analisis data yang bersifat induktif. Data kualitatif yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka, seperti kata-kata tertulis, teks, frasa, maupun simbol (Muhadjir, 1996). Dalam konteks ini, jenis data yang akan digunakan meliputi hasil wawancara antara peneliti dengan informan, serta dokumen-dokumen resmi yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### **1.9.5 Sumber Data**

Sumber data penelitian merupakan aspek penting dalam suatu karya ilmiah, karena melalui data, peneliti dapat melakukan analisis, menyajikan informasi mengenai suatu permasalahan, menarik kesimpulan, serta merumuskan solusi atas

permasalahan yang diteliti. Berdasarkan sumbernya, data diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan informan untuk menggali informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dengan melakukan wawancara mendalam dengan subjek penelitian yaitu informan yang telah disediakan pedoman pertanyaannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui sumber yang secara tidak langsung oleh peneliti (Sugiyono, 2013). Dalam pengambilan data sekunder, peneliti menggunakan sumber-sumber yang didapatkan melalui kajian literatur, seperti buku, jurnal-jurnal ilmiah, situs internet, atau data dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data menjadi bagian utama yang dilakukan oleh penulis. Dalam hal ini, penulis harus memperhatikan data yang dikumpulkan agar dapat menentukan keabsahan validitas kesesuaian tulisan yang diperlukan agar dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik observasi membantu penulis dalam memahami proses yang terjadi secara langsung, seperti bagaimana kebijakan tersebut berjalan.

b. Wawancara

Dalam memperoleh data, peneliti melakukan teknik wawancara kepada narasumber atau informan. Peneliti berperan sebagai pewawancara dan melakukan wawancara kepada informan sebagai seorang yang memberikan keterangan atas pertanyaan penelitian yang sudah disiapkan sebelumnya. Sehingga, data yang didapatkan berupa data yang akurat dan relevan sesuai dengan fenomena yang diteliti. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan dan ditanyakan kepada narasumber terkait penelitian ini. Teknik wawancara dapat dilakukan secara luring maupun daring yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan dokumen terkait sebagai sumber informasi atau data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Pada teknik ini, penulis dapat menyertakan dokumentasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen-dokumen yang memuat informasi yang diperlukan, dan data-data yang

relevan, serta dokumen foto yang diambil saat kegiatan melakukan penelitian.

### 1.9.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini memperoleh data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis secara sistematis untuk memahami keterkaitan antara strategi merawat konstituen dan bantuan pendidikan. Analisis data merupakan usaha atau proses memilih, memilah, membuang, menggolongkan data untuk menjawab permasalahan pokok. Pada tahapan ini, terdapat data-data yang sudah terkumpul menjadi satu, kemudian data tersebut dianalisis yang bertujuan untuk menjawab atas pertanyaan-pertanyaan permasalahan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan penulis yakni analisis kualitatif, sehingga hasil akhirnya akan diperoleh suatu bentuk data yang bersifat deskriptif analitis. Tahapan-tahapan analisis data tersebut ialah *data reduction*, *data display*, dan *making conclusion*.

#### a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah “proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan” (Huberman, 2014). Pada tahapan ini merupakan proses identifikasi data awal yang sudah didapatkan melalui proses pemilihan, penyederhanaan, pengkategorisasian permasalahan melalui deskripsi singkat, mengorganisasikan sebuah data dalam penelitian, serta

mengesampingkan data yang kurang relevan, sehingga dapat mendapatkan hasil yang akan diverifikasi dengan tepat. Hasil reduksi data, yakni mendapatkan data yang spesifik dimana akan memudahkan penulis dalam menganalisis data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan tahap penting dalam penelitian yang berfungsi untuk menyelaraskan serta merangkum data yang telah dikumpulkan, sehingga lebih terstruktur dan mudah dipahami. Pada tahap ini, informasi yang diperoleh diolah menjadi bentuk yang ringkas dan sistematis, kemudian disajikan melalui tulisan tabel, gambar, atau grafik agar mampu memberikan gambaran yang jelas. Proses penyusunan data dilakukan dengan menggabungkan berbagai temuan yang relevan secara terstruktur hingga tahap penarikan kesimpulan, sehingga hasil penyajian dapat merefleksikan kondisi nyata berdasarkan hasil verifikasi data yang diperoleh.

c. Penarikan Kesimpulan (*Making Conclusion*)

Tahapan terakhir dalam analisis data adalah dengan melakukan penarikan inti dari suatu data yang sudah di proses dalam penelitian, sehingga mendapatkan hasil yang menjawab permasalahan penelitian. Kesimpulan yang didapatkan perlu dilakukan secara terus menerus agar mengalami perubahan data yang awalnya masih kurang jelas dan belum pasti menjadi data yang sudah pasti berdasarkan hasil pengamatan langsung dan wawancara mendalam. Tahapan analisis data tersebut akan saling berkaitan

dan mempengaruhi satu sama lain dalam proses analisis data. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan perlu untuk dilakukan secara terus menerus dalam tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, agar mendapatkan hasil yang valid sesuai kajian penelitian.

### **1.9.8 Kualitas Data**

Kualitas data merupakan indikator penting dalam validitas penelitian yang terjadi pada saat pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data atau menganalisis data penelitian. Data yang akurat merupakan data yang diperoleh dari sumber utama atau informan yang tidak terdapat perbedaan dengan realita yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang bertujuan memvalidasi data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data dengan menguji keabsahan data yang sebenarnya melalui pengecekan kembali dari sumber data yang sudah diperoleh melalui sumber diluar data. Pengecekan ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan tujuan penelitian melalui wawancara mendalam dan observasi di lapangan, melakukan konfirmasi dan validasi data dari hasil informasi narasumber ataupun sumber lain yang relevan, serta mencatat kembali dokumentasi data secara teliti.

### **1.10 Sistematika Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas topik analisis kebijakan beasiswa aspirasi dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang gambaran umum awal penelitian yang akan dilakukan dari topik yang akan diteliti yang berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis, tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu, kerangka teori yang dipakai yaitu teori *pork barrel politics*. Operasionalisasi yang berisikan konsep yang relevan terkait penelitian Kebijakan Aspirasi Dalam Perspektif *Pork Barrel Politics* pada Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Aspirasi Hetifah di Kota Samarinda yang akan menjadi dasar pedoman pembuatan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan terkait dengan menerapkan metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis.

## BAB II: GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian yakni Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Penulis mengetahui gambaran umum Kota Samarinda dengan memperoleh data di lapangan melalui observasi dan dokumentasi terkait Kebijakan Aspirasi Dalam Perspektif *Pork Barrel Politics* pada Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Aspirasi Hetifah di Kota Samarinda. Dengan demikian, penulis menyajikan beberapa data yang telah diperoleh dari lapangan, yakni keadaan sosial, ekonomi, dan pendidikan di Kota Samarinda, serta beberapa data terkait Beasiswa KIP-K Aspirasi Hetifah.

## BAB III: PRAKTIK KEBIJAKAN ASPIRASI DALAM DISTRIBUSI BEASISWA KIP KULIAH ASPIRASI HETIFAH

Dalam Bab ini peneliti akan menyajikan data-data yang diperoleh dari penelitian “ KEBIJAKAN ASPIRASI DALAM PERSPEKTIF *PORK BARREL POLITICS* PADA PROGRAM BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH ASPIRASI HETIFAH DI KOTA SAMARINDA”. Pada bab ini berisi paparan temuan yang merupakan data yang ditemukan dari lapangan melalui hasil wawancara mendalam kepada beberapa informan, melakukan observasi, dan studi dokumentasi yang memiliki keterkaitan dengan program KIP Kuliah Aspirasi Hetifah, data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### BAB IV: ANALISIS ATAS TEMUAN PROGRAM BEASISWA KIP-K ASPIRASI HETIFAH DENGAN TEORI *PORK BARREL POLITICS*

Terkait penelitian Kebijakan Aspirasi Dalam Perspektif *Pork Barrel Politics* pada Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Aspirasi Hetifah di Kota Samarinda. Dalam bab ini akan menganalisis secara mendalam bagaimana program tersebut dijalankan sebagai praktik *pork barrel politics* yang digunakan untuk mempertahankan konstituen oleh aktor legislatif di daerah pemilihannya. Analisis dilakukan berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti. Pada bab ini, peneliti akan memaparkan temuan terlebih dahulu kemudian menganalisis temuan tersebut dengan teori strategi merawat konstituen dan teori bantuan pendidikan.

#### BAB V: PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berisi jawaban atas pertanyaan penelitian yaitu berdasarkan rumusan

masalah yang dimuat secara singkat, padat, dan jelas. Selain itu, bab ini juga menyajikan kelemahan penelitian serta saran rekomendasi yang dapat menjadi masukan sekaligus memberikan arah dan peluang pengembangan bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji kebijakan aspirasi dalam upaya merawat konstituen.